

ABSTRAK

Hilman Fathurrahman: Strategi Humas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik.

Penelitian ini mengangkat tema strategi humas dalam pelayanan keterbukaan informasi publik pada PPID Kota Bandung, di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah di era digital. PPID Kota Bandung dipilih sebagai objek penelitian karena PPID Kota Bandung sebagai badan publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung, PPID Kota Bandung memiliki kewajiban untuk memastikan setiap informasi dapat diakses secara terbuka, mudah dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai strategi humas yang diterapkan PPID Kota Bandung dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara humas PPID Kota Bandung melalui empat tahapan yang mengacu pada model empat tahap RACE yang dikembangkan oleh John E. Marston pada tahun 1963, yang terdiri dari empat tahap yaitu: *research* (riset), *action* (aksi), *communication* (komunikasi) dan *evaluation* (evaluasi). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam strategi humas PPID Kota Bandung dalam pelayanan Keterbukaan Informasi Publik, melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi pasif dan observasi digital.

Hasil penelitian yang didapatkan menjelaskan bahwa strategi humas PPID Kota Bandung dalam pelayanan keterbukaan informasi publik melalui model empat tahap RACE yang dilakukan yaitu: 1) Riset digital melalui SIMONIK dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat dan tantangan koodinasi berupa perbedaan pemahaman dan miskomunikasi akibat perpindahan informasi; 2) Aksi dilakukan dengan mengacu pada UU KIP dan PerKI dan penyediaan DIP sebagai instrumen strategis; 3) Komunikasi yang dilakukan menggunakan strategi komunikasi multi-platform dan komunikasi dua arah dalam mekanisme permohonan informasi dan pengajuan keberatan, dan 4) evaluasi dilakukan melalui kegiatan monev KI sebagai indikator keberhasilan. Secara keseluruhan, keempat tahap model RACE yang diimplementasikan oleh PPID Kota Bandung berjalan secara terstruktur dan saling mendukung satu sama lain.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Bandung dilakukan secara sistematis melalui proses perencanaan berbasis data, implementasi kebijakan yang sesuai regulasi, pemanfaatan berbagai platform digital serta evaluasi berkala yang terukur.

Kata Kunci : Strategi Humas, Keterbukaan Informasi Publik, PPID.